



SIKAKI!

Yang Paling Salah Saya, Bukan Jokowi

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, mengaku ikut bersalah atas hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).



Basuki Tjahja Purnama

Ahok, panggilan akrab Basuki, tidak mau kesalahan itu ditimpakan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Joko Widodo. "Kalau mau nyalahin Jokowi, yang paling salah saya. Bukan Jokowi. Kan saya administrator di sini (Pemprov DKI). Ya salah berdua lah minimal. Kalau mau nyalahin, ya salahin saya dong."

■ Halaman 7

Yang Palingdari halaman 1

tegas Ahok kepada Rakyat Merdeka Online, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).

Ia juga mengakui tidak mampu mengawasi kinerja seluruh SKPD dan UKPD DKI sendirian. Untuk itu, ia mengimbau BPK, BPKP, dan Inspektorat DKI, turut serta membantunya mengelola keuangan DKI.

"Saya nggak bisa ngawasin semua makanya saya minta tolong kepada BPK, BPKP dan Inspektorat bantu ngawasin. Kamu nggak bisa ngawasin semua. Anakmu saja mesti minta pembantu, bantu ngawasin supaya dia nggak main ke

jalan," kata Ahok mencontohkan.

Menurutnya penilaian BPK itu adalah hal yang wajar, hanya saja karena saat ini bertepatan dengan momen Pilpres, laporan BPK langsung menarik perhatian banyak pihak. Apalagi, Jokowi adalah salah satu dari dua calon presiden yang ada.

"Ya biasa saja sebetulnya, ini gara-gara pilpres saja dia bikin heboh," tandas Politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta ke

DPRD DKI, Jumat (20/6). Dalam laporan tersebut, ternyata LK DKI tahun 2013 lalu menurun satu tingkat dari WTP menjadi WDP. Padahal dua tahun terakhir DKI menduduki posisi WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Artinya, di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, prestasi Jakarta menurun. Dari temuan itu diketahui, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Re-editing: Mohamad iQbaL